

Edukasi Penerapan Teknologi Informasi dalam Tugas Inspektorat di Kota Lubuklinggau

Arie Yandi Saputra¹, Yogi Primadasa², Hengki Juliansa³, Rakhmad Kuswandhie⁴

^{1,2,3,4}STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau
yogiak45@gmail.com

Abstract

The Lubuklinggau City Inspectorate is an element of the Government Internal Supervisory Apparatus in the area where it is one of the inspectorates that has achieved level 3 on Government Internal Oversight Apparatus (APIP) Capability in 2019 from the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). The level 3 title of APIP capability obtained by the Lubuklinggau City Inspectorate is a prestigious achievement, where only 4 (four) District/City Inspectorates in South Sumatra Province have received it. APIP Level 3 capability means that APIP is expected to play a role as a quality guarantor, overseeing the achievement of regional strategic goals and as consulting which can provide added value to the Regional Government. To be able to improve the performance that has been achieved by the Inspectorate of Lubuklinggau City, the use of information technology is a necessity to apply because information technology can provide added value to the internal control function, especially in achieving audit effectiveness and efficiency, and will indirectly increase audit productivity which provides big impact on the economy. The Community Service Activities that were carried out this time were a concrete form in the context of knowledge transfer to implement an information system that we call the SIMPEL (Follow-Up Monitoring Information Sistem) into the regional internal control work system in order to overcome the problems faced by the inspectorate of the city of Lubuklinggau, namely to provide convenience in carrying out the supervisory function, especially in the evaluation and reporting function.

Keywords: *Information Technology, APIP, SIMPEL, Inspektorat.Government*

Abstrak

Inspektorat Kota Lubuklinggau merupakan salah satu unsur Aparat Pengawasan Interen Pemerintah di daerah dimana merupakan salah satu inspektorat yang telah meraih level 3 pada Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada tahun 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Predikat level 3 Kapabilitas APIP yang diperoleh Inspektorat Kota Lubuklinggau ini merupakan sebuah capaian yang prestisius, dimana hanya terdapat 4 (empat) Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapatkannya. Kapabilitas APIP Level 3 berarti APIP diharapkan berperan sebagai penjamin mutu, mengawal pencapaian tujuan strategis daerah dan sebagai consulting yang dapat memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Daerah. Untuk dapat meningkatkan kinerja yang telah diraih oleh Inspektorat Kota Lubuklinggau maka pemanfaatan teknologi informasi menjadi sebuah keniscayaan untuk diterapkan karena teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah bagi fungsi pengawasan internal, terutama dalam mencapai efektivitas dan efisiensi audit, dan secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas audit yang memberikan dampak besar bagi perekonomian. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang kali ini dilakukan merupakan bentuk nyata dalam rangka transfer pengetahuan untuk mengimplementasikan sistem informasi yang kami sebut dengan istilah SIMPEL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) kedalam sistem kerja pengawasan internal daerah guna mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh inspektorat kota lubuklinggau yaitu untuk memberikan kemudahan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan khususnya pada fungsi evaluasi dan pelaporan.

Kata kunci: *Teknologi Informasi, APIP, SIMPEL, Inspektorat, Pemerintahan*

Majalah Ilmiah UPI YPTK is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Inspektorat Kota Lubuklinggau merupakan salah satu unsur APIP di daerah dimana merupakan salah satu inspektorat yang telah meraih level 3 pada Kapabilitas APIP pada tahun 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Predikat level 3 Kapabilitas APIP yang diperoleh Inspektorat Kota Lubuklinggau ini merupakan sebuah capaian yang prestisius, dimana hanya terdapat 4 (empat) Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Selatan yang mendapatkannya. Kapabilitas APIP Level 3 berarti APIP diharapkan berperan sebagai penjamin mutu, mengawal pencapaian tujuan strategis daerah dan sebagai consulting yang dapat memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Daerah [1], [2], [3], [4].

Untuk dapat meningkatkan kinerja yang telah diraih oleh Inspektorat Kota Lubuklinggau maka pemanfaatan teknologi informasi menjadi sebuah keniscayaan untuk diterapkan [5]. Pentingnya Teknologi Informasi bagi auditor internal, terutama dalam

mencapai efektivitas dan efisiensi audit, dan secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas audit yang memberikan dampak besar bagi perekonomian [6], [7], [8].

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka, kami tertarik untuk bersama melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka transfer pengetahuan untuk mengimplementasikan sistem informasi yang kami sebut dengan istilah Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIMPEL) kedalam sistem kerja pengawasan internal daerah.

SIMPEL sendiri merupakan sistem informasi yang dibangun untuk membantu APIP dalam fungsi evaluasi dan pelaporan dimana sistem ini dibangun dengan berbasis web sehingga mempermudah bagi inspektorat maupun auditee untuk melihat perkembangan tindak lanjut hasil temuan auditor secara daring [9], [10], [11].

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal/audit internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Pada Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 (Kementrian.Negara, 2008) Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya dijelaskan bahwa APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/ unit pengawasan internal pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan internal pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seluruh penyelenggaraan Kegiatan dilingkup APIP haruslah dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan. Berdasarkan pada PP No 60 Tahun 2008 Pemantauan adalah pengawasan oleh manajemen dan pegawai lain yang ditunjuk atas pelaksanaan tugas sebagai penilaian terhadap kualitas dan efektivitas sistem.

Pimpinan Instansi Pemerintah pengendalian internal. Monitoring terhadap sistem pengendalian internal bertujuan untuk meyakinkan bahwa pengendalian internal telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Internal [12]. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan

lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Internal [13], [14].

Pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan difokuskan pada fungsi pemantauan yaitu lebih spesifiknya adalah pemantauan hasil temuan / review yang telah dilakukan oleh auditor kepada OPD di pemerintahan daerah. Hasil temuan yang sangat banyak menjadikan permasalahan tersendiri sehingga terkadang baik APIP maupun OPD yang merupakan auditee sering lalai bahkan mengabaikan hasil temuan tersebut, sehingga secara tidak langsung proses ini akan mempengaruhi proses kinerja APIP yang tentu akan berimbas pada peringkat Kapabilitas yang telah diraih.

Penerapan teknologi informasi dalam hal ini sistem informasi sangat dibutuhkan, dengan harapan seluruh informasi hasil review tersebut dapat tersimpan dalam satu database yang telah terintegrasi sehingga baik dari sisi APIP maupun OPD dapat dengan mudah memantau perkembangan tindakan yang harus dilakukan [15], [16].

Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2014, menyatakan bahwa Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lubuklinggau yang memiliki fungsi dalam Pengendalian Internal di Lingkungan Kota Lubuklinggau. Inspektorat Kota Lubuklinggau adalah inspektorat daerah yang merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kota yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, menyatakan Inspektorat Kabupaten/Kota diartikan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota. Inspektorat Kab / Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [17].

Inspektorat Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah diatur dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 62 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Inspektorat Kota Lubuklinggau. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut [18]:

- a. Penyelenggaraan perencanaan program pengawasan;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, monitoring, evaluasi, review dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. Penyelenggaraan tugas berikutnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Metode Kegiatan

Pelaksanaan PKM ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yang akan dilalui. Tahapan-tahapan ini dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tabel Software dan Hardware Pendukung

No	Tahap	Bentuk Kegiatan
1	Perencanaan	Pembentukan TIM dalam penyusunan proposal
2	Persiapan	Penentuan kebutuhan pengoperasian aplikasi simple
3	Pelaksanaan	Melakukan Edukasi pelatihan penggunaan sistem informasi simple

Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan ini dilaksanakan dengan melakukan pembentukan tim sebanyak 3 orang untuk selanjutnya dilakukan penyusunan Proposal Kegiatan PKM dan kemudian diajukan.

Tahap Persiapan

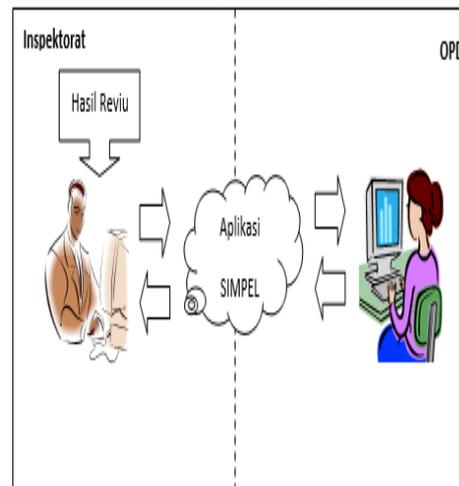
Dalam tahapan persiapan dilakukan dengan dua tahapan yaitu dimulai dari melakukan analisa permasalahan yang dihadapi oleh mitra, kemudian dilanjutkan pada perancangan aplikasi untuk menentukan kebutuhan fungsional pada aplikasi,

a. Dari analisis situasi diperoleh beberapa permasalahan mitra, sebagai berikut:

- 1) Sumber daya manusia; Tugas penanganan pemantauan di lingkup organisasi Inpektorat Lubuklinggau berada pada bagian Eplap (Evaluasi dan Laporan) dibidang tersebut Sumberdaya manusia yang mengelola di data mengenai monitoring /pemantauan ini berjumlah 3 orang, dengan tugas melakukan monitoring terhadap 2 jenis reviu yaitu reviu dari hasil temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Hasil temuan Internal (Pemerintah Daerah). Besarnya tanggungjawab tersebut menjadikan bidang ini kesulitan untuk melakukan pemantauan karena hanya di kerjakan oleh 3 orang sehingga sering kali dijumpai laporan hasil temuan beberapa tahun sebelumnya belum di selesaikan karena tidak terditeksi dengan baik.
- 2) Proses kerja; Tata cara kerja pemantauan dilakukan dengan cara konvensional yaitu dengan pencatatan pada buku atau komputer yang belum tersistem dan terintegrasi.

b. Perancangan sistem informasi; Perancangan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan spesifikasi atau kebutuhan fungsional sistem yang akan diterapkan. Aplikasi SIMPEL yang akan di terapkan dibangun dengan menggunakan flatrom website yang terhubung pada jaringan internet. Teknologi ini dipilih karena kelebihanannya yaitu dapat terhubung dimanapun dan kapanpun. Secara umum SIMPEL dibangun berdasarkan pada konsep kerja yang berlaku di inspektorat dimana setiap hasil temuan baik dari

eksternal (BPK) atau internal akan dicatat dan dikirimkan ke OPD terkait. Gambaran konsep kerja Aplikasi SIMPEL dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Konsep Kerja SIMPEL

Dari gambar tersebut menjelaskan suatu konsep kerja aplikasi SIMPEL yang mana terdiri dari 2 aktor, yang pertama inspektorat dan OPD. Inspektorat berperan sebagai pengawas dan OPD pihak yang diawasi

c. Pembangunan Aplikasi Sempel; Setelah konsep aplikasi telah ditentukan maka tahapan selanjutnya adalah dengan membangun aplikasi SIMPEL. Aplikasi SIMPEL dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Mysql.

Tahap Pelaksanaan

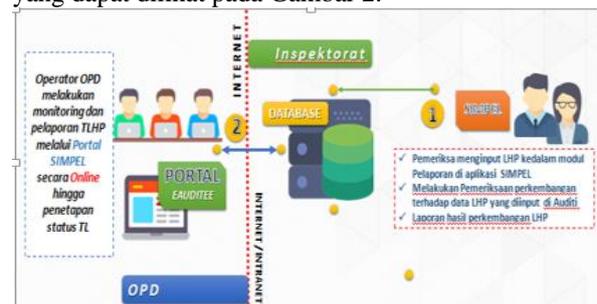
Tahap pelaksanaan dilakukan dengan teknik coaching atau pendampingan. Kegiatan pendampingan ini maksudnya adalah memberikan pengetahuan kepada pengguna aplikasi SIMPEL yaitu pegawai pada bidang eplap dan OPD untuk dapat melakukan pengoperasian aplikasi. Dalam pendampingan ini disiapkan tutorial dalam bentuk buku manual pengoperasian aplikasi SIMPEL.

Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi ini dimulai dengan memberikan pertanyaan post-test dan pre-test kepada para siswa sebelum dan sesudah kegiatan sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan dari kegiatan ini untuk bahan evaluasi bagi tim pelaksana PKM STMIK Bina Nusantara Jaya kedepannya.

Alur Kerja

Secara umum sistem informasi ini memiliki alur kerja yang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Skema SIMPEL Inspektorat Kota Lubuklinggau

Pada gambar ini menjelaskan operator melakukan monitoring dan pelaporan TLHP melalui portal SIMPEL secara online hingga penetapan status TL, selanjutnya data di terima oleh inspektorat. Inspektorat melakukan pemeriksaan menginput LHP kedalam modul pelaporan aplikasi SIMPEL, melakukan pemeriksaan perkembangan terhadap data LHP yang diinput di auditi dan laporan hasil perkembangan LHP. Untuk mempejelas nya lebih detail dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Laporan Hasil LPH

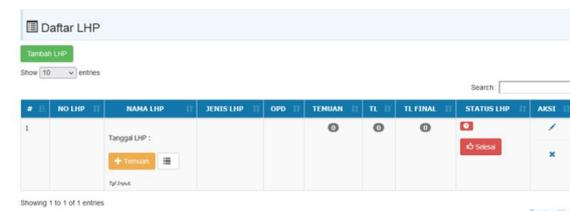
3. Hasil dan Pembahasan

Dari seluruh rangkaian tahapan kegiatan PkM yang telah dilakukan maka di peroleh hasil yang dicapai yaitu sebuah aplikasi yang memiliki fungsi untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan Pemantauan / monitoing hasil reviu yang dapat diakses dialamat <https://simpler.inspektorat.lubuklinggaukota.go.id>. Tampilan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan PkM dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4 Tampilan Home Page Aplikasi SIMPEL

Selanjutnya tahapan-tahapan pengerjakan aplikasi simpler dimulai dari menu LHP, menu LHP mempunyai aktivitas menambah LHP. Tampilan menu LHP dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5 Menu LHP

1. Klik Tombol
2. Setelah di klik, maka akan tampil form LHP baru. Administrator dipersilahkan untuk mengisi seluruh kolom yang tersedia pada form tersebut.
3. Setelah form diisi, maka data yang telah diisi akan di tampilkan pada daftar LHP seperti tampak pada Gambar 6 dan 7.

Gambar 6 Form Tambah LHP

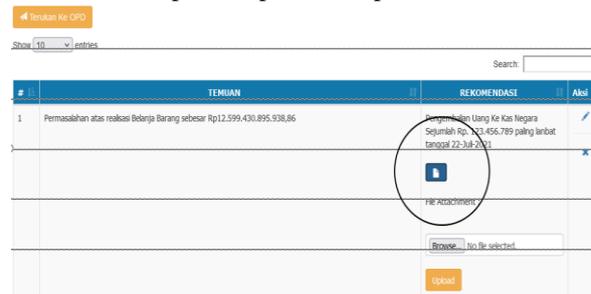
#	NO LHP	NAMA LHP	JENIS LHP	OPD	TEMUAN	TL	TL FINAL	STATUS LHP	AKSI
1	001.001 /LHP/2021	REALISASIBELANJA SUBSIDI BUNGA KREDIT USAWA RAKYAT/URUSAN NON KUR DAN/ATAU BANGGA P-C-PEN BELUM MEPEKERATKAN KESAPAN PEKASANAAN PROGRAM SEHINGGA TERDAPAT DAMA SUBSIDI MENGENGAPKAN PERBANKAN/LEMBAGA PENYULUNG BELUM DISALURKANPER 31 DESEMBER 2020 SEBESAR Rp3.960TRILJUN Tanggal LHP : 02 Februari 2021.	LHP Ekstern	Dinas Sosial Kota Lubuklinggau				0 Tidak Daftar Temuan Belum Diinput	

Gambar 7 Daftar LHP yang terisi

Menu tambah data temuan merupakan form yang digunakan untuk melakukan penambahan data / informasi temuan. Menu ini berfungsi berdasarkan pada LHP yan telah diinputkan sebelumnya:

1. Klik Tombol
2. Akan tampil formulir temuan
3. Isi kolom “Jumlah Temuan”. Kolom ini diisi dengan angka sesuai dengan jumlah temuan yang terdapat dalam LHP terkait
4. Klik Tombol “Simpan Data” apabila form telah diisi semua.
5. Setelah berhasil disimpan maka pada menu daftar LHP akan tampil jumlah temuan pada kolom Temuan
6. Dan terakhir apabila telah selesai maka silahkan Klik tombol “Teruskan ke OPD” untuk menyampaikan iformasi temuan ke OPD yang terkait

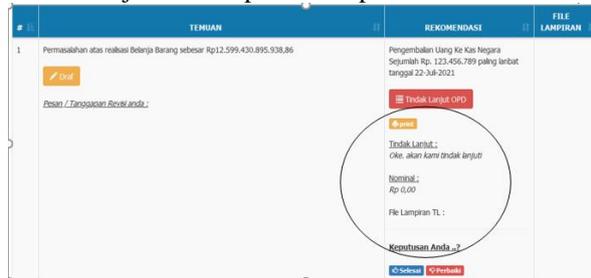
Menu lampiran pada menu LPH, menu lampiran merupakan fitur yang diberikan apabila administrator ingin melampirkan file pendukung dari temuan yang ada. Menu lampiran dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8 Menu Lampiran

Pada menu lampiran ini pengguna silahkan klik tombol garis hijau pada daftar LPH, selanjutnya klik browse dan dilanjutkan klik tombol upload. Maka status LPH akan tercentang. Terdapat beberapa jenis status pada LPH di aplikasi SIMPEL ini, setiap status memiliki arti yang berbeda.

Selanjutnya, menindaklanjuti TL yang sudah dilakukan oleh OPD. Tahapan ini dapat dilakukan dengan cara klik tombol daftar temuan, pada halaman sub menu “Perlu ditanggapi”, lalu akan muncul halaman baru yang berisikan TL yang sudah dilakukan dengan cara klik tombol “Tindak Lanjut OPD “. Tindak lanjut OPD dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9 Tindak Lanjut OPD

Selanjutnya layanan directori, layanan ini merupakan layanan / menu untuk menampilkan seluruh informasi daftar LPH di seluruh OPD/ auditi. Dalam menu ini ditampilkan informasi yaitu :

a. *LHP Intern*

Menu ini untuk melihat seluruh daftar LHP Intern (Inspektorat Kota Lubuklinggau)

b. *LHP Ekstern*

Menu ini untuk melihat seluruh daftar LHP Ektern (Pihak Luar BPK dll)

c. *LHP Intern Selesai*

Melihat seluruh daftar LHP Intern yang telah selesai

d. *LHP Intern Belum Selesai*

Melihat seluruh daftar LHP Intern yang telah belum selesai (masih proses)

e. *LHP Ekstern Selesai*

Melihat seluruh daftar LHP ekstern yang telah selesai.

Direktori dapat dilihat pada Gambar 10.

#	NAMA OPD	LHP INTERN	LHP EKSTERN	LHP INTERN SELESAI	LHP INTERN BELUM SELESAI	LHP EKSTERN SELESAI	LHP EKSTERN BELUM SELESAI
1	Dinas Sosial Kota Lubuklinggau	●	●	●	●	●	●
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lubuklinggau	●	●	●	●	●	●

Gambar 10 Direktori

Selain itu juga dilakukan pendampingan dalam rangka pengoperasian aplikasi kepada seluruh pegawai yang terkait baik dari Inpektorat Kota Lubuklinggau maupun OPD yang ada di lingkungan Kota Lubuklinggau. Kegiatan penyuluhan dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11 Kegiatan Penyuluhan

Pada kegiatan penyuluhan ini, tim memberikan suatu arahan/ demo penggunaan ataupun pengoperasian sistem informasi penanganan tindak lanjut temuan (SIMPEL). Untuk kegiatan pendampingan dapat dilihat pada Gambar 12



Gambar 12 Kegiatan Pendampingan

Pada kegiatan pendampingan ini, tim memberikan suatu arahan/ demo penggunaan ataupun pengoperasian sistem informasi penanganan tindak lanjut temuan (SIMPEL) yang mana nantinya bisa menjadi pemahaman bagi Insektorat Kota

4. Kesimpulan

Dari kegiatan PkM yang telah dilaksanakan maka didapat kesimpulan bahwa Aplikasi SIMPEL telah diterapkan di Inspektorat Kota Lubuklinggau dimana aplikasi ini dapat digunakan oleh Inspektorat untuk memudahkan salah satu fungsi nya yaitu pada fungsi monitoring atau pemantauan dan Pengoepasian aplikasi telah dibekali dengan adanya manual book dan pendampingan / coaching guna pengoperasian aplikasi agar para pengguna aplikasi dapat lebih memahaminya.

Daftar Rujukan

[1] Furqani, A., & Rusnani, R. (2021). Kesiapan Penggunaan Teknologi Informasi Pada Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Sumenep). *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 164-178. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v5i3>

- [2] Suriza, N. (2017). Analisis Peranan Inspektorat Dalam Menjalankan Fungsi Pengawas Intern Pemerintah (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Gunungkidul). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(3).. <https://doi.org/10.22146/abis.v5i3.59278>
- [3] Haris, A., Kusmanto, H., & Mardiana, S. (2016). Fungsi pengawasan inspektorat kabupaten serdang bedagai. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 6(1), 110-128. <https://doi: 10.25072/jwy.v4i1.316>
- [4] Sugihartono, T. (2018). Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, 7(1), 52-56.
- [5] Ulfah, R., Nurdin, I., & Handayani, N. (2020). Implementasi Pengawasan Pemerintahan Oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. *Jurnal Media Birokrasi*, 109-122.
- [6] Ahmi, A., Saidin, S. Z., Abdullah, A., Ahmad, A. C., & Ismail, N. A. (2016). State of information technology adoption by internal audit department in Malaysian public sector. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7), 103-108.
- [7] Anshori, S. (2018). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, 2(1).
- [8] Budiman, H. (2017). Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 31-43.
- [9] Firmansyah, I., & Nursantika, D. (2017). Sistem Informasi Eksekutif Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur. *Prosiding SNATIF*, 365-371.
- [10] Dilson, D., & Suhery, L. (2016). Sistem Informasi Pengawasan Internal Inspektorat Berbasis Client Server. *Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology*, 2(1), 89-108.
- [11] Putra, I. K. T. A. (2022). Pengaturan Larangan Rangkap Jabatan Mentri Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 8(2), 434-443.
- [12] Fahmi, I. (2018). TA: Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Perijinan Perusahaan dan Industri Berbasis Web pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya (Doctoral dissertation, Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya).. <https://doi.org/10.35961/jppmkepri.v1i2.198>
- [13] Rasminto, H., & Kuncoro, A. A. (2018). Perancangan Sistem Informasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Terpadu Dengan Metode Berorientasi Objek. In *Prosiding Seminar Nasional & Internasional (Vol. 1, No. 1)*.
- [14] Sidik, M. A., Nurmawati, D., Siregar, R. A., Anam, S., Sanisah, S., Alip, I. N., ... & Rizki, M. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Media Edukasi Pencegahan Penularan Covid-19, Media Pemasaran, dan Media Pembelajaran Pada Masyarakat Kelurahan Sei Jang, Kota Tanjung Pinang. *JPPM Kepri: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau*, 1(2), 140-155.
- [15] Juhji, J. (2017). Model Pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat dalam Pembelajaran IPA. *Primary: Jurnal Keilmuan Dan Kependidikan Dasar*, 8(1), 25-34.. <https://doi.org/10.55606/nusantara.v1i1.237>
- [16] Hariyanti, E., & Purwanti, E. (2018). Perancangan Sistem Dashboard Untuk Monitoring Indikator Kinerja Universitas. *SESINDO 2014*, 2014.
- [17] Sukeni, Y., Najmah, N., & Idris, H. (2021). Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Pada Fasilitas Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University).
- [18] Indonesia, P. R. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.